

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* Dimoderasi Gaya Kepemimpinan

Ghaitsya Zahira¹, Fefri Indra Arza²

^{1,2}Universitas Negeri Padang, Indonesia

E-mail: ghaitsyazahira2@gmail.com

Article History:

Received: 29 Juni 2026

Revised: 22 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Keywords:

sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, moralitas individu, gaya kepemimpinan, pencegahan fraud, sem-pls

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Padang. Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode survei dengan pendekatan SEM-PLS dan melibatkan 100 ASN yang bertugas di bidang pengelolaan keuangan pada berbagai SKPD Kota Padang. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur berskala Likert dan dianalisis menggunakan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal ($\beta = 0,332$; $p = 0,000$), komitmen organisasi ($\beta = 0,232$; $p = 0,000$), moralitas individu ($\beta = 0,234$; $p = 0,000$), dan gaya kepemimpinan ($\beta = 0,286$; $p = 0,000$) masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Sementara itu, gaya kepemimpinan tidak terbukti memoderasi pengaruh ketiga variabel independen terhadap pencegahan fraud ($p > 0,05$). Model penelitian memiliki daya prediksi yang kuat dengan nilai $R^2 = 0,739$. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan SPI, pembentukan karakter moral ASN, dan pengembangan kepemimpinan transformasional secara bersamaan sebagai strategi komprehensif pencegahan fraud di Pemerintah Kota Padang.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Namun, fenomena *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang mengancam akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Menurut statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Tindak Pidana Korupsi (TPK), terdapat 75 kasus yang melibatkan pemerintah daerah dari total 161 kasus pada tahun 2023. Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan *fraud* belum berjalan efektif dan memerlukan penguatan sistem pengendalian yang komprehensif (Rizkiyani & Rosalina, 2024).

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat tidak lepas dari permasalahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Kejaksaan Negeri Padang menangani sebanyak lima perkara korupsi sepanjang 2022 yang menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah, meliputi dugaan korupsi pembangunan gedung kebudayaan, penyalahgunaan dana hibah KONI Padang, hingga penataan kawasan strategis (Padang Ekspres, 2023). Bahkan pada tahun 2025, Kejaksaan Negeri Padang menggeledah rumah anggota DPRD Sumbar terkait dugaan korupsi kredit modal kerja dengan kerugian negara mencapai Rp 34 miliar (Harian Haluan, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Padang masih terus terjadi dan memerlukan perhatian serius.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) memegang peranan krusial dalam upaya pencegahan *fraud* di sektor publik. Penelitian empiris menunjukkan bahwa SPI memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, di mana semakin kuat sistem pengendalian internal yang diterapkan, semakin rendah kemungkinan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan (Ariani *et al.*, 2021). Selain SPI, komitmen organisasi juga menjadi faktor penting, di mana pegawai yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih patuh terhadap peraturan dan prosedur yang ditetapkan, serta memiliki motivasi intrinsik untuk menjaga integritas (BPKP, 2023). Moralitas individu merupakan dimensi penting lainnya yang mempengaruhi perilaku *fraud*, karena individu dengan moralitas tinggi tidak akan membenarkan tindakan *fraud* secara psikologis meskipun tekanan dan kesempatan tersedia (Dewi & Ratnadi, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan inkonsistensi hasil, di mana beberapa penelitian menemukan pengaruh signifikan faktor-faktor tersebut sementara penelitian lainnya tidak (Wijayanti & Hanafi, 2019; Putri, 2022). Perbedaan hasil menunjukkan adanya faktor kontekstual seperti karakteristik organisasi dan budaya kerja yang perlu diperhitungkan (Tuanakotta, 2014; Singleton & Singleton, 2010). Selain itu, penelitian terdahulu belum ada yang secara simultan menguji gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi terhadap hubungan ketiga variabel tersebut dengan pencegahan *fraud* dalam satu model terintegrasi, khususnya di Pemerintah Kota Padang (Mardiasmo, 2018). Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan tujuan menganalisis pengaruh SPI, komitmen organisasi, dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*, serta mengevaluasi peran gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei dan pendekatan *Structural Equation Modeling – Partial Least Squares* (SEM-PLS). Menurut Sugiyono (2017), penelitian kuantitatif didasarkan pada filosofi positivisme dan bertujuan untuk mengkaji populasi atau sampel tertentu. SEM-PLS dipilih karena metode ini memungkinkan analisis hubungan kompleks antara variabel manifes dan laten secara simultan, termasuk efek moderasi, serta mampu menangani ukuran sampel yang relatif kecil (Hair *et al.*, 2017).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ASN yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di seluruh SKPD Kota Padang, diestimasi sebanyak 250–300 ASN. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria: (1) ASN aktif di SKPD Kota Padang; (2) memiliki tugas terkait pengelolaan keuangan; (3) telah bekerja minimal 1 tahun; dan (4) bersedia menjadi responden (Sugiyono, 2019). Berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% dan populasi $N = 275$, diperoleh sampel minimum 74 responden, sehingga penelitian ini menetapkan 100 responden untuk meningkatkan *statistical power* (Hair *et al.*, 2017).

Instrumen penelitian adalah kuesioner terstruktur dengan Skala Likert lima poin yang

mengukur lima konstruk: Sistem Pengendalian Internal (X1) diadaptasi dari kerangka COSO (2013), Komitmen Organisasi (X2) berdasarkan teori Meyer & Allen (1991), Moralitas Individu (X3) mengacu pada teori Kohlberg (1984), Gaya Kepemimpinan (M) berdasarkan dimensi Bass & Avolio (1994), dan Pencegahan *Fraud* (Y) mengacu pada ACFE (2020). Evaluasi model pengukuran dilakukan melalui uji validitas konvergen (*factor loading* > 0,70 dan AVE > 0,50), validitas diskriminan (*Fornell-Larcker Criterion*), serta reliabilitas (Cronbach's Alpha dan Composite Reliability > 0,70). Pengujian efek moderasi menggunakan pendekatan *product indicator* pada SmartPLS 4. Pengujian hipotesis dilakukan melalui prosedur *bootstrapping* dengan 5.000 iterasi, dengan kriteria penerimaan hipotesis jika t-statistik > 1,96 dan p-value < 0,05 (Hair *et al.*, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, masa kerja, instansi asal, dan jabatan/posisi dalam organisasi. Ringkasan karakteristik 100 responden penelitian disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	58	58%
	Perempuan	42	42%
Usia	20–30 tahun	12	12%
	31–40 tahun	35	35%
	41–50 tahun	38	38%
	> 50 tahun	15	15%
Pendidikan Terakhir	SMA/SMK	5	5%
	Diploma (D3)	10	10%
	Sarjana (S1)	63	63%
	Magister (S2)	20	20%
	Doktor (S3)	2	2%
Masa Kerja	1–5 tahun	18	18%
	6–10 tahun	27	27%
	11–20 tahun	40	40%
	> 20 tahun	15	15%
Instansi	Bappeda Kota Padang	30	30%
	Inspektorat Kota Padang	30	30%
	SKPD lainnya	40	40%
Jabatan/Posisi	Bendahara dan Pengelola Keuangan SKPD	35	35%
	Pejabat Eselon III dan IV	22	22%
	Auditor dan Verifikator Keuangan	18	18%
	Staf Administrasi Keuangan	17	17%
	Staf Analisis dan Perencanaan	8	8%

Sumber: Data Primer yang diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (58%) dan didominasi kelompok usia produktif 31–50 tahun (73%), yang menunjukkan bahwa pengelola keuangan daerah Kota Padang umumnya merupakan ASN yang sudah berpengalaman. Tingkat pendidikan responden didominasi oleh Sarjana (S1) sebanyak 63% dan Magister (S2) sebanyak 20%, mencerminkan kualifikasi sumber daya manusia yang baik. Sebanyak 82% responden memiliki

masa kerja di atas 6 tahun, dan komposisi jabatan didominasi oleh bendahara serta pengelola keuangan SKPD, sehingga jawaban responden dapat dianggap valid dan representatif terhadap praktik pengelolaan keuangan daerah.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan gambaran umum mengenai nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum setiap variabel penelitian, beserta Tingkat Capaian Responden (TCR) yang dihitung dengan formula $TCR = (\text{Mean}/5) \times 100\%$. Hasil statistik deskriptif variabel penelitian disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev	TCR (%)
Sistem Pengendalian Internal (X1)	100	1	5	3,92	0,54	78,40
Komitmen Organisasi (X2)	100	1	5	3,87	0,52	77,40
Moralitas Individu (X3)	100	1	5	3,90	0,53	78,00
Gaya Kepemimpinan (M)	100	1	5	3,88	0,51	77,60
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	100	1	5	3,91	0,55	78,20

Sumber: Data Primer yang diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata di atas 3,87 dengan TCR berkisar 77,40%–78,40%, yang berarti semua variabel berada dalam kategori 'Cukup Baik'. Sistem pengendalian internal memiliki nilai rata-rata tertinggi (Mean = 3,92; TCR = 78,40%), sementara komitmen organisasi memiliki nilai rata-rata terendah (Mean = 3,87; TCR = 77,40%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi SPI, komitmen organisasi, moralitas individu, gaya kepemimpinan, dan upaya pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintah Kota Padang sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat ruang yang besar untuk terus ditingkatkan.

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Seluruh 32 indikator penelitian memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70 (tertinggi: MI3 = 0,875; terendah: GK6 = 0,714), sehingga semua indikator dinyatakan valid secara konvergen. Nilai AVE seluruh konstruk berkisar antara 0,610–0,662 ($> 0,50$), Cronbach's Alpha 0,872–0,921 ($> 0,70$), dan Composite Reliability 0,904–0,935 ($> 0,70$), sehingga seluruh konstruk dinyatakan valid dan reliabel. Uji validitas diskriminan menggunakan *Fornell-Larcker Criterion* menunjukkan bahwa akar kuadrat AVE setiap konstruk (0,781–0,813) lebih besar dari korelasi antarkonstruk, mengkonfirmasi validitas diskriminan yang baik.

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 untuk variabel Pencegahan *Fraud* adalah 0,739 (R^2 adjusted = 0,727), masuk kategori kuat ($\geq 0,67$), yang berarti variabel SPI, Komitmen Organisasi, Moralitas Individu, dan Gaya Kepemimpinan beserta efek moderasinya secara bersama-sama mampu menjelaskan 73,9% variasi dalam Pencegahan *Fraud* di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis melalui bootstrapping disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Jalur	Koefisien	T-statistik	P-value	Keputusan
-----------	-------	-----------	-------------	---------	-----------

H1	SPI → Pencegahan Fraud	0,332	5,864	0,000	Diterima
H2	Komitmen Organisasi → Pencegahan Fraud	0,232	3,629	0,000	Diterima
H3	Moralitas Individu → Pencegahan Fraud	0,234	4,149	0,000	Diterima
H4	Gaya Kepemimpinan → Pencegahan Fraud	0,286	5,195	0,000	Diterima
H5	GK × SPI → Pencegahan Fraud (Moderasi)	0,068	1,207	0,228	Ditolak
H6	GK × KO → Pencegahan Fraud (Moderasi)	-0,078	1,247	0,212	Ditolak
H7	GK × MI → Pencegahan Fraud (Moderasi)	-0,001	0,010	0,992	Ditolak

Sumber: Data Primer yang diolah (2026)

Pembahasan

Pengaruh SPI terhadap Pencegahan Fraud (H1). SPI terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* ($\beta = 0,332$; $t = 5,864$; $p = 0,000$). SPI merupakan determinan terkuat dalam model ini. Temuan ini sejalan dengan *Fraud Triangle Theory* (Cressey, 1953) yang menyatakan bahwa SPI efektif mempersempit elemen *opportunity* melalui pemisahan tugas, prosedur otorisasi ketat, audit internal independen, dan pelaporan keuangan yang transparan. Hasil ini konsisten dengan Ariani *et al.* (2021) pada OPD Kabupaten Buleleng serta Rizkiyani dan Rosalina (2024) pada pemerintah daerah Jawa Timur yang secara konsisten membuktikan pengaruh positif dan signifikan SPI terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan Fraud (H2). Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan ($\beta = 0,232$; $t = 3,629$; $p = 0,000$). Dalam kerangka *Fraud Triangle Theory*, komitmen organisasi berperan dalam menekan elemen *pressure* karena ASN dengan *affective commitment* yang tinggi tidak mudah terdorong oleh tekanan yang mengarah pada perilaku *fraud*, meskipun tekanan tersebut bersifat finansial maupun non-finansial (Meyer & Allen, 1991). Hasil ini sejalan dengan Purnama dan Lestari (2019) yang menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, dengan dimensi *affective commitment* sebagai prediktor terkuat.

Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud (H3). Moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan ($\beta = 0,234$; $t = 4,149$; $p = 0,000$). Berdasarkan teori perkembangan moral Kohlberg (1984), ASN pada tahap *post-conventional* memiliki prinsip moral yang mandiri sehingga tidak mampu membenarkan tindakan *fraud* secara psikologis, menekan elemen *rationalization* dalam *Fraud Triangle Theory*. Temuan ini konsisten dengan Dewi dan Ratnadi (2017) serta Purnama dan Lestari (2019) yang membuktikan peran strategis moralitas individu dalam mencegah kecurangan di organisasi pemerintahan.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Pencegahan Fraud (H4). Gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan ($\beta = 0,286$; $t = 5,195$; $p = 0,000$), merupakan determinan terbesar kedua setelah SPI. Pemimpin transformasional menciptakan *tone at the top* yang berintegritas melalui dimensi *idealized influence*, *inspirational motivation*, *intellectual stimulation*, dan *individualized consideration* (Bass & Avolio, 1994), yang secara signifikan berkontribusi mencegah terjadinya *fraud*. Hasil ini mendukung penelitian Tesfaye dan Nguyen (2023) yang membuktikan kontribusi nyata pemimpin transformasional dalam mencegah *fraud* di pemerintahan lokal negara-negara berkembang.

Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderasi (H5, H6, H7). Ketiga hipotesis efek moderasi ditolak secara statistik ($p > 0,05$). Gaya kepemimpinan tidak terbukti memoderasi pengaruh SPI ($t = 1,207$; $p = 0,228$), komitmen organisasi ($t = 1,247$; $p = 0,212$), maupun moralitas individu ($t = 0,010$; $p = 0,992$) terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini dapat dijelaskan karena SPI yang didasarkan pada regulasi mengikat seperti PP No. 60 Tahun 2008 bersifat otonom dan tidak bergantung pada variasi gaya kepemimpinan. Komitmen organisasi bersifat lebih intrinsik dan

personal, sementara moralitas individu pada tahap *post-conventional* bekerja independen dari otoritas eksternal (Kohlberg, 1984). Dengan demikian, gaya kepemimpinan dalam konteks ini berperan lebih signifikan sebagai variabel independen yang memiliki pengaruh langsung terhadap pencegahan *fraud*, bukan sebagai variabel moderasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, moralitas individu, dan gaya kepemimpinan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Padang. Sistem pengendalian internal merupakan determinan terkuat dalam model, diikuti oleh gaya kepemimpinan, moralitas individu, dan komitmen organisasi. Sementara itu, gaya kepemimpinan tidak terbukti memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, maupun moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*, sehingga gaya kepemimpinan dalam konteks ini lebih tepat diposisikan sebagai variabel independen yang berpengaruh langsung, bukan sebagai variabel moderasi. Secara keseluruhan, model penelitian memiliki daya prediksi yang kuat, yang mengkonfirmasi bahwa pendekatan multidimensi yang memadukan faktor struktural, psikologis, dan kepemimpinan sangat efektif dalam memahami dinamika pencegahan *fraud* di sektor publik.

SARAN

Bagi Pemerintah Kota Padang, perlu diprioritaskan penguatan seluruh komponen sistem pengendalian internal, terutama pada aspek penilaian risiko dan pemantauan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengendalian keuangan. Program pengembangan kepemimpinan transformasional perlu dirancang bagi seluruh pejabat struktural dengan penekanan pada pembentukan keteladanan integritas. Pelatihan etika, sosialisasi kode etik ASN, dan pembentukan budaya integritas perlu menjadi agenda rutin Badan Kepegawaian Daerah. Penguatan komitmen organisasi perlu dilakukan secara holistik melalui peningkatan kesejahteraan pegawai, pengembangan karir yang transparan, dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan sampel yang lebih besar dengan cakupan lokasi yang lebih luas, serta menambahkan variabel lain seperti budaya organisasi, *whistleblowing system*, dan kualitas sumber daya manusia agar diperoleh model pencegahan *fraud* yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- ACFE. (2020). Report to the nations on occupational fraud and abuse. Association of Certified Fraud Examiners. <https://www.acfe.com/>
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud examination* (4th ed.). South-Western Cengage Learning.
- Ariani, N. M. D., Sujana, E., & Darmawan, N. A. S. (2021). Pengaruh pengendalian internal, moralitas individu, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(1), 234–245.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving organizational effectiveness through transformational leadership*. SAGE Publications.
- BPKP. (2023). *Fraud risk governance: Pengelolaan risiko kecurangan dalam organisasi sektor publik*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. <https://www.bpkp.go.id/>
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row Publishers.

-
- Cohen, J., Krishnamoorthy, G., & Wright, A. (2021). Organizational commitment, ethical behavior, and fraud prevention in public sector organizations. *Journal of Business Ethics*, 168(3), 521–539. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04512-3>
- COSO. (2013). Internal control – integrated framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. <https://www.coso.org/>
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Dewi, N. L. P. S., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Pengaruh sistem pengendalian internal pada pencegahan kecurangan dengan moralitas sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1448–1477.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publications.
- Harian Haluan. (2025, Januari 15). Kejaksaan Negeri Padang geledah rumah anggota DPRD Sumbar terkait dugaan korupsi Rp 34 miliar. <https://harianhaluan.com>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kohlberg, L. (1984). *The psychology of moral development: The nature and validity of moral stages*. Harper and Row Publishers.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). Statistik tindak pidana korupsi. <https://www.kpk.go.id/>
- Louwers, T. J., Henry, E., Reed, B. J., & Gordon, E. A. (2020). Internal control effectiveness and fraud risk in developing country public sectors. *Managerial Auditing Journal*, 35(6), 745–768. <https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2019-2387>
- Luthans, F. (2011). *Organizational behavior: An evidence-based approach* (12th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Penerbit Andi.
- Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. *Human Resource Management Review*, 1(1), 61–89. [https://doi.org/10.1016/1053-4822\(91\)90011-Z](https://doi.org/10.1016/1053-4822(91)90011-Z)
- Mustika, R. (2018). Pengaruh komitmen organisasi, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 55–68.
- Padang Ekspres. (2023, Januari 10). Kejari Padang tangani lima perkara korupsi sepanjang 2022. <https://padangekspres.co.id>
- Pemerintah Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. <https://peraturan.go.id/>
- Purnama, I. G. A., & Lestari, P. V. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, moralitas, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(3), 294–305.
- Putri, D. A. (2022). Pengaruh sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap pencegahan fraud pada pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 201–214.
- Rizkiyani, A., & Rosalina, K. (2024). Pengaruh sistem pengendalian internal dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 7(1), 45–58.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud auditing and forensic accounting* (4th ed.). John
-

Wiley & Sons.

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Statistika untuk penelitian. Penerbit Alfabeta.

Svanström, T., & Sundgren, S. (2022). Individual morality, ethical awareness, and anti-fraud behavior among public sector accountants in Asia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 15(1), 89–118. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol15no1.4>

Tesfaye, B., & Nguyen, T. H. (2023). Transformational leadership and fraud prevention in local government: Evidence from developing countries. *International Journal of Public Sector Management*, 36(2), 178–197. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-05-2022-0134>

Tuanakotta, T. M. (2014). Akuntansi forensik dan audit investigatif (Edisi 2). Salemba Empat.

Wijayanti, R., & Hanafi, R. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 2(1), 78–92.